

**ANALISIS KINERJA PENGAWASAN KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN**

TESIS

OLEH

**SAPAR ASARUDDIN HASIBUAN
NPM. 121801079**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Kinerja Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan

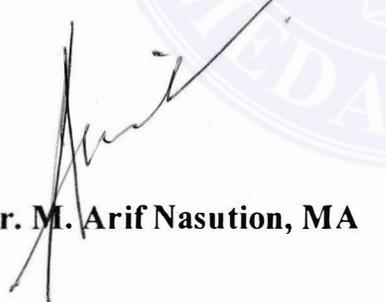
Nama : Sapar Asaruddin Hasibuan

NPM : 121801079

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA


Dr. Warjio, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur


Dr. Warjio, MA


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 16 Des 2014

Nama : Sapar Asaruddin Hasibuan

NPM : 121801079



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Desember 2014

Yang menyatakan,



Sapar Asaruddin Hasibuan

ABSTRAK

Analisis Kinerja Pengawasan Kepabeanan dan Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan

Peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibidang perekonomian negara adalah sebagai trade facilitator, industrial assistance, revenue collector, dan community protector. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan (KPPBC Medan) adalah sebagai sebuah kantor pengawasan dan pelayanan yang telah ditetapkan sebagai kantor modern sebagai perwujudan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

KPPBC Medan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pelayanan kegiatan kepabeanan dan cukai di Kota Medan dan sekitarnya. Apalagi sejak berpindahnya Bandara Internasional Polonia ke Bandara Internasional Kualanamu yang merupakan salah satu obyek pengawasan KPPBC Medan yang jaraknya lebih kurang 30 km dari KPPBC Medan. Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja pengawasan pada unit Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) pada KPPBC Medan.

Salah satu produk peraturan tentang pengawasan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja pengawasan di KPPBC Medan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data antara lain: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup kinerja pengawasan pada KPPBC Medan terlalu luas dengan kegiatan kepabeanan dan cukai yang ada.

Kata kunci: kinerja, pengawasan.

ABSTRACT

Monitoring The Performance Analysis of Customs and Excise In The Office Customs and Excise Type Madya B Medan

The strategic role of the Directorate General of Customs and Excise in the Medan of economy of the country is as a trade facilitator, industrial assistance, revenue collector, and community protector. Office of Surveillance and Customs and Excise Type Madya B Medan (KPPBC Medan) is as an office supervision and services that have been established as a modern office as the embodiment of bureaucratic reform in the Ministry of Finance.

KPPBC Medan has a very important role in monitoring and service activities of customs and excise in Medan and surrounding areas. Moreover, since the transfer of Polonia International Airport to Kuala Namu International Airport which is one of the control KPPBC Medan distance of approximately 30 km from KPPBC Medan office. The main problems are the subject of this thesis is to investigate and analyze the performance of supervision in the unit Prosecution and Investigation Section (Section P2) on KPPBC Medan.

One product regulations on supervision is the Minister of Finance Number : P - 53 / BC / 2010 dated December 23, 2010 on Procedures for Monitoring, the authors do penelitan to determine the performance of supervision in KPPBC Medan. This study used quantitative descriptive approach. Data collection techniques include: observation, interviews, and documentation.

The results of the study showed that the scope of the surveillance performance KPPBC Medan too broad with activities of existing customs and excise.

Keywords : performance, supervision.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Kinerja Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Admistrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area – Medan, Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam penggunaan teori maupun dalam penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif dari para pembaca, sehingga ke depan penulis dapat lebih sempurna dalam melakukan penulisan untuk penelitian berikutnya.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang sangat bernilai harganya demi terselesaikannya tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yth. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;

2. Yth. Bapak Prof. M. Arif Nasution, MA sebagai pembimbing I yang dengan pengertian dan kesabaran memberikan dorongan, arahan, dan masukan sehingga terselesaikannya tesis ini;
3. Yth. Bapak Dr. Warjio, MA sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik sekaligus sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan ketulusan dan kesabaran;
4. Yth. Bapak Siswo Suharto sebagai Kepala KPPBC Medan telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data;
5. Yth. Bapak Achmad Fatoni sebagai atasan kerja penulis yang telah mengizinkan dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi S2 penulis di program pendidikan pascasarjana ini;
6. Rekan-rekan kerja penulis yang telah ikut membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UMA;
8. Para staf administrasi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UMA;
9. Ayahanda **Mughtar Hasibuan (almarhum)** dan Ibunda **Salbiah**, sembah sujud, hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang tersayang, yang telah membesarkan,

mendidik, serta mendoakan saya dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga sekarang.

10. Ayahanda mertua **Mahyaruddin Nasution** dan Ibu mertua, **Nurlan Tobing** atas bimbingan, dorongan semangat serta doa yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.

11. Istriku tercinta, **Julianita Nasution, S Kom.** dan buah hatiku **Surya Abdillah Muchtar Hasibuan** dan **Tasya Azzahra Hasibuan**, tiada kata lain yang bisa papa sampaikan selain ucapan syukur dan terima kasih atas kesabaran, dorongan, semangat, pengorbanan, dan doa yang tulus dan penuh cinta dari kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesibukan dalam penyelesaian pendidikan ini, tugas papa sebagai suami dan ayah kadang terabaikan.

Akhir kata, dengan menyampaikan doa dan mengharap ridho dari Allah SWT penulis berharap agar tesis ini dapat berguna sebagai pedoman untuk kegiatan penulisan di jenjang berikutnya.

Medan, November 2014

Penulis,

Sapar Asaruddin Hasibuan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN ORISINAL	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kinerja	11
2.2. Teori Pengawasan	14
2.3. Kinerja Pengawasan	19
2.4. Kepabeanan dan Cukai	28
2.5. Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	46
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.3. Informan Penelitian	47

4.2.2.3	Terlalu banyaknya obyek pengawasan.....	98
4.2.2.4	Terlalu luasnya area pengawasan.....	99
4.2.2.5	Tingginya beban kerja pengawasan di KPPBC Medan.....	99

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	100
5.2.	Saran	101

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	62
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat	62
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	63
Tabel 4.4 Target IKU Seksi P2 Tahun 2013	69
Tabel 4.5 Obyek Pengawasan KPPBC Medan	72
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Pengawasan KPPBC Medan	73
Tabel 4.7 SDM Pengawasan KPPBC Medan Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.8 SDM Pengawasan KPPBC Medan Berdasarkan Diklat Teknis Pengawasan Yang Pernah Diikuti	74
Tabel 4.9 Penindakan Tahun 2014	76
Tabel 4.10 Pencapaian Target Kinerja Pengawasan 2013	78
Tabel 4.11 ABK Tahun 2013 Seksi P2 Beban Kerja Tiap Jabatan	82
Tabel 4.12 ABK Tahun 2013 Seksi P2 Penghitungan Kebutuhan Pegawai, Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja Jabatan (EJ), serta Prestasi Jabatan (PJ)	86
Tabel 4.13 Profil Pegawai Seksi P2 (Berdasarkan Diklat Teknis yang Pernah Diikuti)	90
Tabel 4.14 Tabel Penerimaan Negara KPPBC Medan Tahun 2012-2013	94

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen yang baik terdiri empat unsur, yaitu unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan unsur pengawasan. Keempat unsur tersebut dilakukan saling bersinergi untuk menuju tercapainya cita-cita suatu institusi. Mengawasi pada dasarnya adalah mengawasi semua apa yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diarahkan, tanpa pengawasan yang baik terhadap ketiga unsur manajemen semua usaha akan sulit mencapai efektivitas tujuan. Materi yang diawasi adalah tiga hal atau kombinasinya yaitu uang, barang dan orang. Ketiganya masing-masing memerlukan penanganan secara berlainan. Diantara ketiganya yang lebih mudah diawasi uang dan barang karena biasanya dalam keadaan konstan, untuk pengawasan terhadap orang relatif lebih sulit karena ada perbedaan spesifikasi atau karakter dan kapabilitas masing-masing individu. Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang. Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu: a) menentukan standar, b)

mengukur hasil atas dasar standar dan c) mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan perbaikan. Mengetahui adanya ketidakberesan, maka pengawas berkewajiban bertindak sesuai ketentuan yang berlaku atau pun melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), dan pengawasan umpan balik (*feed back control*). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barata, Atep Adya, 2003, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bryson, John M., 1995, *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations, A Guide to Strengthening and Sustainin Organizational Achievement*, Revised Edition, Josey-Bass Publisher, San-Francisco.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Penilaian Kerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah disampaikan pada Seminar Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Dean M, Harris, *Ethics in Health Services and Policy: A Global Approach*, 2011, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnely JR., James H., 1996, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kedelapan*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Handoko, 1988, *Kinerja dan Tingkat Emosional, Pratama*, Surabaya.
- Moleong, Lexi J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moenir, 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Akşara
- Keban, Yeremias T., 1995, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Makalah disajikan pada seminar sehari Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- David Osborne, Peter Plastrik, *The Reinventor's Fieldbook: Tools for Transforming Your Government*, 2000, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Warella, Y. 1997, *Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik* Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Madya ilmu Administrasi Negara. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Wirawan, 2002, *Kapita Selekta Teori Kepemimpinan Pengantar untuk Praktek dan Penelitian*, Yayasan Bangun Indonesia & Uhamka Press, Jakarta.
- Zeithaml, Valarie A., (et.al), 1985, *Servqual : A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality* dalam *Journal of Retailing*, Spring.
- Zeithaml, Valarie A., (et.al), 1990, *Delivering Quality Services : Balancing Customer Perceptions and Expectations*, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York.
- Karen Hardy, *Enterprise Risk Management: A Guide for Government Professionals*, 2012, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Hal. G. Rainy, *Understanding and Managing Public Organizations*, 2012, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
- Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 120), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tanggal 16 Januari 1997 Tentang Tatalaksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.04/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegehan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;

Dwiyanto, Agus, Partini, Ratmito, Wicaksono, Bambang, Tamtiari, Wini, Kusumasari, Beveola, nuh, Muhammad, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, diterbitkan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Galang Printika, Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus, dkk.2003, Reformasi Tata pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Gasperz, Vincent, 1997. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

Gerson, Richard F., 2002, Mengukur Kepuasan Pelanggan, Terjemahan, PPM, Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 101/BC/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan dan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui mengenai kinerja pengawasan di KPPBC Medan?
2. Bagaimana cara kerja pengawasan di KPPBC Medan?
3. Apakah kinerja unit pengawasan (Seksi P2) ditarget?
4. Kalau ditarget, bagaimana pencapaian target target tersebut?
5. Bagaimana kuantitas kinerja Seksi P2?
6. Bagaimana cara mengukur beban kerja Seksi P2?
7. Bagaimana cara mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja Seksi P2?
8. Apakah anda mengetahui kondisi SDM unit pengawasan KPPBC Medan?
9. Bagaimana kondisi SDM Pengawasan di KPPBC Medan?
10. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana bagi Seksi P2?
11. Melihat kondisi yang ada seperti dijelaskan sebelumnya, bagaimana pendapat anda organisasi KPPBC Medan pada saat ini?